

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A Yoeti Oka, 1994. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Angkasa. Bandung.
- Abdullah Syukur, 1987. *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan"*. Persadi. Ujung Pandang.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Arief Muljadi. 2006, *Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Chafid Fandeli, 1995. *Dasar Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*, Liberty, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Djoko Sudantoko, 2003. *Dilemma Otonomi Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Hari Sabarnno, 2007. *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah "Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Kesatuan Bangsa"*. Sinar Grafika Jakarta.
- Josef Riwu Kaho. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republic Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Oetjito Irawan. 1990. *Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta
- Sarman. 2012. *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*. PT Rineka Cipta. Jakarta.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Penerbit. Universitas Indonesia.

Sarundajang. SH. 1997. *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*. Pustakan Sibar Harapan. Jakarta.

Siswanto Sunarno, 2005, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,

Sutarno NS, 2004. *Manajemen Perpustakaan*, Sagung Seto, Jakarta.

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Istano Basa Pagaruyung dan Pengelolaan Objek Wisata dan Unit Pelaksana Teknis (Upt) Gedung Nasional Maharajo Dirajo Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah

## **C. Website**

[www.djpk.depku.go.id](http://www.djpk.depku.go.id), diakses pada tanggal 9 Oktober 2016 pukul 21.00 WIB

[id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org), diakses tanggal 30 Oktober 2016 pukul 23.05 WIB

[www.ksmtour.com](http://www.ksmtour.com) diakses pada tanggal 3 November 2016 pukul 22.43 WIB

[www.tempatwisataunik.com](http://www.tempatwisataunik.com) diakses tanggal 5 November 2016 pukul 10.46 WIB